

## Data Perdagangan Orang Juli 2014

“Apa beda antara korban *trafficking* dan salah prosedur pengiriman tenaga kerja?” Pertanyaan ini bisa menjadi titik masuk pembeda dalam menginvestigasi kasus perdagangan orang. Disahkannya Undang-Undang anti perdagangan orang tidak otomatis membuat legislasi ini dijalankan, sebaliknya di lapangan beragam hambatan, seperti ketidakmauan mempelajari substansi human *trafficking* membuat implementasi UU ini semakin jauh dari harapan. Para aparat keamanan umumnya mengartikan korban *trafficking* hanya sebatas ada atau tidaknya dokumen identitas diri tenaga kerja. Padahal ‘apa sih yang tidak bisa dibeli dalam sistem yang korup’ ?

Ketidakmampuan maupun ketidakmauan aparat keamanan pengawas penegakan hukum maupun aparat pemerintah untuk mempelajari UU tindak pidana perdagangan orang membuat aktivitas mereka di lapangan pun terbatas. Kejahatan jaringan terorganisir hanya sebatas dipahami sebagai ‘kerja belakang meja’. Ketidakmampuan untuk memahami human trafficking membuat aktivitas mereka amat terbatas. Sebatas mengeja dokumen, tanpa mampu melakukan investigasi jaringan kriminal terorganisir. Ini lebih dipersulit jika jaringan kriminal telah berumah di dalam institusi ini sendiri. Sehingga dengan mudah aktivitas kriminal dijalankan tanpa ada ketakutan terhadap penegakan hukum.

DPO (Data Perdagangan Orang) IRGSC merupakan bagian dari upaya menjaga ingatan. DPO adalah publikasi regular yang berisikan ringkasan berita di tiga media harian utama di NTT yakni *Pos Kupang* (PK), *Timor Express* (TE) dan *Victory News* (VN) sebagai referensi utama, yang memuat persoalan seputar migrasi tenaga kerja, khususnya yang terkait dengan perdagangan orang (*human trafficking*) baik di lingkup domestik maupun internasional. Selain tiga media di atas, DPO IRGSC juga menggunakan berita *on line* lain sebagai alat verifikasi. Satu dekade pasca kasus Nirmala Bonat terbukti penanganan buruh migran tidak semakin baik, sebaliknya semakin diterlantarkan di kampung halaman sendiri, oleh berbagai institusi pemerintah, maupun para pelaku dari sektor privat (PPTKIS maupun para PL (Petugas/Perekrut Lapangan))

Penerbitan **DPO IRGSC** adalah bagian dari pengembangan **NTT Studies** oleh **IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change)**. **Peneliti:** Arif Rahman, Juwita Boboy, Randy Banunaek, Ragil Supriyanto Samid, Gregorius Aviero, Rosna Bernadetha, Yadi Diaz, John Petrus Talan, Joseph Robert, Indra Yohanes Kiling **Koordinator:** D.Elcid Li. Riset ini merupakan bagian dari ‘riset aksi’ yang dilakukan IRGSC dalam **Ampera (Aliansi Menolak Perdagangan Orang)** yang melibatkan berbagai elemen seperti: **JPIT** (Jaringan Perempuan Indonesia Timur), **PIAR** (Pusat Informasi Advokasi Rakyat), **Rumah Perempuan**, **JRUK** (Jaringan Relawan Untuk Kemanusiaan) maupun secara individual.



## Daftar Isi

DAFTAR SINGKATAN .....	5
Rangkuman Umum .....	7
Daftar Perusahaan/Individu yang perlu diawasi atau dihukum .....	9
Daftar Institusi Publik yang perlu diawasi:.....	11
Daftar Institusi yang bekerja memberantas <i>trafficking</i> :.....	11
Ringkasan Berita Surat kabar .....	12
Selasa, 1 Juli 2014 .....	12
PJTKI Malindo Selalu Bermasalah (VN, Hal: 10) .....	12
Rabu, 2 Juli 2014 .....	13
PT Adoni Tekan 19 TKW Ilegal (VN, Hal: 9) .....	13
Kamis, 3 Juli 2014.....	13
Polisi Lamban Tuntaskan Perekrut TKI Ilegal (VN, Hal: 14) .....	13
Selasa, 8 Juli 2014 .....	13
Polisi Minta Keluarga TKW Medan Tenang (VN, Hal: 14) .....	13
Selasa, 8 Juli 2014 .....	14
Direkrut PPTKIS Resmi Tapi Manipulasi Identitas (TE, Hal: 9,10).....	14
Selasa, 15 Juli 2014 .....	14
Memprihatinkan, Kondisi TKI NTT Korban <i>Trafficking</i> (TE, Hal: 1,7) .....	14
Kamis, 17 Juli 2014.....	15
TKW NTT Diberi Obat Perusak Saraf Otak (PK, Hal: 5) .....	15
Jumat, 18 Juli 2014.....	16
Satpol PP Amankan Delapan TKI Ilegal (VN, Hal: 11) .....	16

Jumat, 18 Juli 2014.....	17
Masalah TKI Tanggung Jawab Bersama (VN, Hal: 8).....	17
Jumat, 18 Juli 2014.....	17
Tim Gabungan Cokok TKI Ilegal Dari Belu (PK, Hal: 14) .....	17
Sabtu, 19 Juli 2014 .....	17
Pertikaian Perwira Polda “Makan Korban” (VN, Hal: 3).....	17
Sabtu, 19 Juli 2014 .....	18
Polres Gagalkan Pemberangkatan 49 TKI (VN, Hal: 12).....	18
Minggu, 20 Juli 2014 .....	18
Polisi Bekuk 62 Orang Calon TKI (PK, Hal: 4).....	18
Senin, 21 Juli 2014.....	19
Pekerja Perempuan NTT Rentan Kekerasan (VN, Hal: 7) .....	19
Senin, 21 Juli 2014.....	19
Tuntaskan Semua Kasus TKI (VN, Hal: 8) .....	19
Rabu, 23 Juli 2014 .....	20
Polisi Masih Dalam Delapan Kasus TKI Ilegal (PK, Hal: 15).....	20
Kamis, 24 Juli 2014.....	20
Bersihkan Polisi Nakal (VN, Hal: 2).....	20
Kamis, 24 Juli 2014.....	21
BNP2TKI: Jangan Jadi TKI Kaburan (VN, Hal: 11).....	21
Kamis, 24 Juli 2014.....	22
Tifa Dorong Lembaga Keuangan Bantu TKI (VN, Hal: 12) .....	22
Kamis, 24 Juli 2014.....	22

Polres TTU Komitmen Tuntaskan Masalah TKI (VN, Hal: 12) .....	22
Kamis, 24 Juli 2014 .....	23
Danlanud Gagalkan Pengiriman 3 CTKI Ilegal (TE, Hal: 9,10) .....	23
Kamis, 24 Juli 2014 .....	23
Pembab Belu Gagalkan Pengiriman Tenaga Kerja Ilegal (TE, Hal:13) .....	23
Sabtu, 26 Juli 2014 .....	24
Polda NTT Sarang Mafia <i>Trafficking</i> (VN, Hal: 3) .....	24
Minggu, 27 Juli 2014 .....	25
Lima Wanita Ngada Hilang dari Rumah (PK, Hal: 3) .....	25
Kamis, 31 Juli 2014 .....	25
Rekrut TKW, Rebeca Ledoh Disidangkan (TE, Hal: 9,10) .....	25

## Daftar Singkatan

AKAD	: Antar Kerja Antar Daerah
AKBP	: Ajun Komisaris Besar Polisi
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BNP3TKI	: Badan Nasional Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BRIGJENPOL	: Brigadir Jendral polisi
BRIGPOL	: Brigadir polisi
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
JPIC	: Justice Piece and Integrity Creation
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KAPOLDA	: Kepala Kepolisian Daerah
KAPOLRES	: Kepala Kepolisian Resor
KEJARI	: Kejaksaan Negeri
KP3	: Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan
KOMNAS HAM	: Komisi nasional Hak Asasi Manusia
LANUD	: Pangkalan Angkatan Udara
MABES POLRI	: Markas besar Polisi Republik Indonesia
MAPOLDA	: Markas Kepolisian Daerah
NAKERTRANS	: Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
PANSUS	: Panitia Khusus
PEMKOT	: Pemerintah Kota
PEMPROV	: Pemerintah Provinsi
PJTKI	: Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
PENCAKER	: Pencari tenaga kerja

PN	: Pengadilan Negeri
POLPP	: Polisi Pamong Praja
POLRES	: Kepolisian Resor
POLRESTA	: Kepolisian Resor Kota
PPTKIS	: Perusahaan Panyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta
RPK	: Rumah Perempuan Kupang
SATGAS	: Satuan Tugas
SATPOL PP	: Satuan Tugas Polisi Pamong Praja
TIPIDUM	: Tindak Pidana Umum
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TKP	: Tempat Kejadian Perkara

## Rangkuman Umum

Berdasarkan kerja pendampingan Rumah Perempuan Kupang terhadap korban *trafficking*, antara Bulan Januari-Juli 2014 terdapat 54 orang korban yang mereka dampingi. Rata-rata mereka direkrut oleh PPTKIS resmi. Jadi sekali lagi ini bukan soal PPTKIS resmi atau bukan, tetapi 'proses rekrutmen itu sendiri'.

*Masih banyak PPTKIS yang resmi, tetapi dalam perekrutan tenaga kerja masih melakukan manipulasi administrasi atau identitas para naker, seperti, penipuan usia pekerja, nama, dan tempat tinggal. Karena itu, Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Nakertrans, dan Dispenduk harus melakukan pengawasan ketat*

---

**Libby SinlaEloE, Rumah Perempuan**

**Di titik mana *trafficking* sudah bisa di-identifikasi?**

Sejauh ini terlihat berbagai aparat, baik aparat keamanan maupun aparat pemerintah terkait masih belum mampu menangkap apa yang disebut sebagai 'trafficking'. Ketidakmampuan 'mengendus' *trafficking* pun kemudian disederhanakan menjadi 'ada atau tidaknya dokumen'. Ini membuktikan sosialisasi soal undang-undang anti perdagangan orang perlu dilakukan secara menyeluruh.

Aparat keamanan m, maupun berbagai instansi penanganan tenaga kerja dalam Bulan Juli 2014, menangkap maupun menyelamatkan para korban di beberapa titik:

- Tahap *Supply*, atau di jalur rekrutmen: para CTKI bersama perekrut ditahan saat masih berada di kabupaten asal
- Tahap penampungan sementara di kantor cabang PPTKIS di Kupang
- Tahap Pintu Keluar: di bandar udara, saat CTKI akan meninggalkan ibukota provinsi NTT

- Tahap penampungan di kantor pusat PPTKIS: di Tangerang, Semarang, Batam, dll.
- Tahap melarikan diri dari kantor

Kapan mereka disebut sebagai korban? Apakah korban *trafficking* baru bisa disebut korban jika sudah disiksa, atau meninggal di tangan majikan, atau bagaimana? Pemahaman ini lemah sekali di tangan aparat kepolisian di NTT. Umumnya beranggapan bahwa mereka baru disebut korban jika 'sudah dikirim' meninggalkan NTT. Hal ini membuat orang bertanya apa peran polisi dalam mengontrol alur *supply* dalam perdagangan orang?

Investigasi mendalam terkait penipuan yang dilakukan oleh Perekrut Lapangan (PL) amat jarang dilakukan oleh pihak kepolisian. Saat ini bahkan hingga sampai pada tahap penyiksaan pun, polisi di NTT 'tidak bergerak'. Ambil contoh kasus perbudakan di Medan. Para pelaku, terutama dari PPTKIS, PT.Paulisa hingga kini tidak tersentuh. Direktrisnya pun ada di Kupang, tetapi yang diusut Cuma Rabeca Ledoh. Padahal di tingkat *supplier* tenaga kerja keduanya ada di level yang sama, mengapa dalam tindak penegakan hukum keduanya diperlakukan berbeda?

Selanjutnya, hal lain yang membuat migrasi tenaga kerja makin kompleks adalah dalam gambaran aparat migrasi tenaga kerja yang perlu diurus hanya yang menuju ke luar negeri. Padahal NTT sebagai sumber tenaga kerja murah dan takluk (baca: tidak banyak protes majikan), menjadi daerah rekrutmen untuk kebutuhan tenaga kerja domestik, baik di kota-kota besar di Pulau Jawa, maupun di pedalaman Kalimantan, di perkebunan kelapa sawit milik perusahaan multinasional.

Sesuai dengan pengakuan Yorita, awalnya dia (Yorita) disiksa oleh majikannya sehingga karena tak tahan, dia lantas melaporkan kejadian itu ke polisi setempat. Bukannya ditolong, polisi justru malah menyiksa dia selama satu minggu dan disuruh guling-guling di lantai, sampai Yorita mengalami depresi hebat. Setelah puas menyiksa Yorita, polisi lantas menyerahkannya ke petugas imigrasi untuk dideportasi karena bersamaan dengan selesainya visa kerja Yorita. Saat berada di tangan petugas imigrasi, justru perlakuan lebih keji yang dialaminya. Dia disuruh telan pil yang belakangan diketahui adalah obat perusak saraf di bagian otak. Setelah minum pil itu, Yorita pun tidak ingat apa-apa lagi, termasuk namanya sendiri. Namun jika dibandingkan antara polisi Malaysia dan polisi imigrasi Malaysia, yang paling kejam itu petugas polisi imigrasinya. Teman-teman di Selangor juga mengakui hal itu, termasuk petugas polisi imigrasi Selangor.

**Pater Piter Bataona, Koordinator *Justice Piece and Integrity Creation* (JPIC) SVD Timor,**



## Daftar Perusahaan/Individu yang perlu diawasi atau dihukum

### 1. PT. Malindo Mitra Perkasa (No.1)

- a. Memiliki catatan permasalahan selain yang dibebankan oleh Brigpol Rudy Soik
- b. Pihak yang bisa dimintai pandangan: Kepala Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (PPTK) Dinas Nakertrans Provinsi NTT, Paul Kedang
- c. Catatan: PT.Malindo juga terkait pemulangan 69 TKI illegal dari Malaysia, dan penangkapan TKI illegal di Surabaya

### 2. PT.Adoni Aplah Abadi (No.2)

- a. Kasusnya ini dibuka oleh Rumah Perempuan, oleh Staf Bidang Pendampingan dan Advokasi, Ester Mantaon
- b. Modus: Identitas 19 tenaga kerja dipalsukan, selama dua minggu mereka ditampung di kantor cabang Kupang. Para Perekrut Lapangan 'telah membayar' orangtua para korban.
- c. Kepala Cabang: Adrianus Ndun, saksi: Helena Pakpahan

### 3. Tidak diketahui Pengirimnya (No.2), ditampung di Batam

- a. Sebanyak 20 orang perempuan asal NTT ditampung di Gereja Katholik Santa Petrus, selama dua bulan mereka diberikan pelatihan menjahit
- b. Penanggungjawab: Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus
- c. Catatan: para korban dijanjikan akan dipekerjakan ke Medan, tetapi saat di Batam malah dialihkan untuk dikirim ke Malaysia. Mereka tidak memiliki identitas resmi, sehingga sebagian memilih melarikan diri, dan ditampung di aula gereja.

### 4. Tidak diketahui pengirimnya (No.7)

- a. Korban bernama Yorita Nomleni, asal Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT.
- b. Disiksa majikan di Selangor, Malaysia maupun oleh polisi dan petugas imigrasi Selangor, Malaysia
- c. Diduga diberikan obat perusak saraf di bagian otak, yang membuat korban tak ingat apa-apa. Perlakuan semacam ini bukan pertama kalinya terjadi, tetapi telah di-identifikasi oleh mitra JPIC di Pangkal Pinang.
- d. Dipulangkan melalui Batam
- e. Difasilitasi oleh Justice Piece and Integrity Creation (JPIC) SVD Timor dan Suster FMM

f. Koordinator: Pater Piter Bataona

**5. Lambertus Hale dan Densy Leto (PT. Mulia Agro Permai, Kalimantan Tengah) (No.8, 16 dan 22)**

- a. Satpol PP Kabupaten Belu mengagalkan 6 orang CTKI yang hendak berangkat kerja ke Kalimantan Tengah, tanpa memiliki dokumen.
- b. Selain 6 orang ini, Satpol PP juga menahan sepasang suami-istri yang merekrut
- c. Ditahan saat mereka berada dalam bis Paris Indah, di terminal Halilulik, Kecamatan Tasifeto Barat (Rabu, 16/7).
- d. Berdasarkan data Bloomberg PT.Mulia Agro Permai beregrak di bidang minyak kelapa sawit, dan PT. ini berbasis di Baamang., Indonesia, dan sejak 12 Juni 2006 berrfungsi sebagai anak perusahaan [KL-Kepong Plantation Holdings Sdn Bhd.](#) yang berpusat di Kuala Lumpur, Malaysia <sup>1</sup> Di wilayah Kalimantan Tengah setidaknya PT.Mulia Agro Permai menguasai sekitar 9000 hektar lahan sawit di wilayah Sampit.<sup>2</sup>

**6. Tidak diketahui, Tujuan Kalimantan (No.12 dan No.13) (Diduga terkait PT.Mulia Agro Permai)**

- a. Jumlah pekerja sebanyak 62 orang (versi PK) atau sebanyak 49 orang (versi VN), hendak dibawa ke Kalimantan
- b. Asal pekerja: Belu dan TTU (Insana)
- c. Ditahan Pukul 00.30 Kamis (17/7), karena rombongan pekerja tidak memiliki dokumen
- d. Kapolres TTU, I Gede Mega Suprawitha mengaku tidak tahu siapa perekrut. Tetapi jika melihat waktu perekrutan, dan skema pengiriman bisa dipastikan penangkapan sehari sebelumnya di Halilulik berkaitan dengan dengan 62/49 orang yang ditahan sebelumnya.

**7. Gregorius Pinga Longa (33), pengemudi truk ekspedisi**

- a. Sebanyak 5 perempuan asal Kabupaten Ngada dan Nagekeo dibawa supir truk ekspedisi tanpa pemberitahuan orang tua
- b. Ditangkap Polres Cirebon, Jawa Barat, tidak diketahui tujuan akhir
- c. Kelimanya tidak memiliki dokumen

**8. Tidak Diketahui Perekrutnya (No.21)**

- a. Tiga calon TKI menuju Jakarta dan Batam ditahan di Bandar Udara El Tari Kupang (Senin, 21/7)
- b. Tidak memiliki dokumen

---

<sup>1</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Kuala\\_Lumpur\\_Kepong\\_Berhad](http://en.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur_Kepong_Berhad) [Diakses 16 Desember 2014]

<sup>2</sup> <http://lpp.dephut.go.id/media.php?module=izin&sub=listing&izin=4>

### Daftar Institusi Publik yang perlu diawasi:

1. Polres Ende
  - a. Tersangka pelaku *trafficking* dilepaskan polisi, dengan membiarkan pelaku makan di warung tanpa dikawal. Protes terhadap kerja Polres Ende disuarakan oleh Forum Peduli Masyarakat Kecil, Blasius A. Rinda
2. Direskrimsus Polda NTT (No.11, 17)
  - a. Sejumlah staf Direskrimsus Polda NTT diduga bakal dimutasi karena pertikaian dengan Direskrimsus Kombes M.Slamet dan Direskrimum Kombes Sam Kawengian terkait penanganan kasus PT.Malindo Mitra Perkasa.
  - b. Anggota Direskrimsus yang diduga bakal dimutasi adalah AKBP Teja Lasmana. Sedangkan AKP I Gede Sucitra, Ipda Adriana Hurint, Aiptu Djoni Boro, Brigpol Diktus M Abor, Brigpol Rudi Soik, dan Briptu A Sellyana Dimu.
  - c. Kombes Sam Kawengian berpendapat penangkapan ini diluar kewenangan Direskrimsus, sementara

### Daftar Institusi yang bekerja memberantas *trafficking*:

1. Polres Kupang
  - a. Lima kasus *trafficking* diproses di Polres Kupang. Dua kasus sudah P-21, dan tiga lagi dalam pemberkasan.
2. Danlanud El Tari
  - a. Menggagalkan pengiriman TKI menuju Jakarta dan Batam jam 4 pagi di Bandar Udara El Tari
3. Satpol PP Kabupaten Belu
4. Polres TTU

## Ringkasan Berita Surat kabar

No	Tanggal	Judul	Ringkasan Berita
1	Selasa, 1 Juli 2014	PJTKI Malindo Selalu Bermasalah (VN, Hal: 10)	<p>Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Malindo yang beralamat di Jalan HTI Kelurahan Maulafa, Kota Kupang dinilai selalu berubah dalam mengirim TKI asal NTT.</p> <p>Hal ini terbukti dengan keterlibatan perusahaan tersebut dalam kasus-kasus TKI yang ada di NTT. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (PPTK) Dinas Nakertrans Provinsi NTT, Paul Kedang kepada VN, Senin (30/6).</p> <p>Dia mengatakan sejauh pengamatan mereka PT Malindo juga terlibat dalam kasus pemulangan 69 TKI ilegal dari Malaysia, beberapa waktu lalu, yang hingga kini belum ada penyelesaiannya.</p> <p>Selain itu, yang terakhir terlibat dalam kasus TKW ilegal yang ditangkap di Surabaya. Dia mengaku, pihaknya tidak memiliki taring untuk bertindak lebih banyak karena terbentur dengan aturan terutama pada Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.</p> <p>“UU ini harus direvisi terutama semua kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor cabang menjadi kewenangan Pusat. Jika tidak direvisi, maka persoalan ini tidak akan pernah selesai, sebab akan terus terjadi pengurusan izin keberangkatan berada di badan perizinan, sedangkan Nakertrans bertugas mengeluarkan surat rekomendasi,” ujarnya.</p> <p>Dengan demikian kasus-kasus seperti yang dilakukan PT Malindo, kata dia, Nakertrans tidak bisa bertindak lebih sejauh hanya memulangkan para TKI. Dia menambahkan dari aturan tersebut seperti ada dualisme penanganan TKI bermasalah antara BP3TKI dan Nakertrans.</p> <p>Kepala BP3TKI NTT Tato Tirang mengakui penerapan UU Nomor 39 Tahun 2004 mengalami dualisme, namun sepanjang perekrutan TKI dilaksanakan dengan benar maka permintaannya harus berdasarkan permintaan nyata dari negara bersangkutan.</p> <p>Dinas Nakertrans di kabupaten/kota maupun provinsi jangan hanya melihat pada kewenangannya saja, namun menyusahkan masyarakat. Bahkan kasus <i>trafficking</i> menjadi kasus yang terpelihara oleh sistem sehingga tidak mampu terselesaikan dalam penegakan aturannya.</p>

2	<b>Rabu, 2 Juli 2014</b>	<b>PT Adoni Tekan 19 TKW Ilegal (VN, Hal: 9)</b>	<p>Sebanyak 19 orang calon TKW yang dipalsukan identitasnya oleh PT Adoni Aplah Abadi Cabang Kupang mengaku ditekan oleh pihak perusahaan untuk mengganti rugi semua biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan.</p> <p>Hal ini membuat mereka takut untuk meninggalkan perusahaan tersebut walau sudah dua minggu ditampung sebelum diamankan polisi, Kamis (26/6). Hal ini diungkapkan Staf Bidang Pendampingan dan Advokasi Rumah Perempuan, Ester Mantaon kepada VN, Selasa (1/7). Dia mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan dan pengakuan para korban, identitas semua korban dipalsukan oleh pihak perusahaan perekrut yakni PT Adoni Aplah Abadi Cabang Kupang.</p> <p>“Para korban ingin keluar dari tempat penampungan tersebut, namun mendapatkan tekanan dari pihak perusahaan untuk membayar ganti rugi karena para PL telah membayar orangtua mereka sehingga identitasnya dipalsukan pun mereka ikut,” jelasnya. Sampai saat ini, kata dia, pihaknya terus melakukan pendampingan untuk mengusut tuntas kasus tersebut sampai pada pemulangan para korban. “Jika pihak kepolisian telah menyelesaikan BAP maka para korban akan segera dipulangkan.</p> <p>Pihak Polda akan memanggil kepala cabangnya yakni Adrianus Ndun dan Helena Pakpahan yang telah dipanggil sebagai saksi. Kita berharap agar statusnya dapat dinaikkan menjadi tersangka sehingga ada proses penegakan hukum bagi mereka karena secara jelas telah melakukan kasus <i>trafficking</i>,” tandasnya.</p>
3	<b>Kamis, 3 Juli 2014</b>	<b>Polisi Lamban Tuntaskan Perekrut TKI Ilegal (VN, Hal: 14)</b>	<p>Jajaran Polres Ende dinilai lamban dalam menyelesaikan kasus Syamsudin yang merupakan tersangka kasus perekrut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kabur beberapa bulan lalu.</p> <p>Syamsudin kabur setelah polisi telah mengambil Berita Acara Pemeriksaan dan memberikan izin Syamsudin untuk membeli makan tanpa pengawasan. Ketua Forum Peduli Masyarakat Kecil, Blasius A Rinda kepada VN, Rabu (2/7) mengatakan, upaya pembiaran yang dilakukan kepolisian membuat masyarakat mencurigai bahwa polisi tidak profesional dalam menangani berbagai macam kasus termasuk kasus perekrutan TKI ilegal.</p> <p>Padahal kasus ini sangat menyita perhatian publik, namun polisi terkesan melakukan pembiaran dan lamban mencari pelaku kejahatan tersebut. “Bagaimana mungkin kepolisian yang sudah tahu berbuat jahat untuk pergi beli makan tanpa pengawalan. Ini konyol,” ujarnya.</p>
4	<b>Selasa, 8 Juli 2014</b>	<b>Polisi Minta Keluarga TKW Medan Tenang (VN, Hal: 14)</b>	<p>Polisi dari Mapolda NTT meminta Keluarga TKW, korban penyekpan di Medan, Sumatera Utara untuk mempercayai kasus yang sedang diproses tidak diintervensi pihak manapun. Hingga saat ini kasus yang dialami Marni Baun dan Rista Bota, dan kawan-kawannya sudah P-21 dan menunggu sidang di</p>

			<p>pengadilan. Demikian dikatakan Kombespol Samuel Kawengian saat di temui VN, Senin (7/7), menanggapi informasi suap yang dilakukan oleh majikan para korban terhadap keluarga korban. Sekalipun pelaku melakukan upaya penyogokan kepada para keluarga korban, namun proses hukum tidak dapat dibeli dengan apapun. "Kasus ini statusnya telah P-21 sehingga siap di sidangkan di pengadilan. Informasi suap itu tidak ada pengaruh terhadap proses hukum yang berjalan," ungkapnya.</p>
5	<b>Selasa, 8 Juli 2014</b>	<b>Direkrut PPTKIS Resmi Tapi Manipulasi Identitas (TE, Hal: 9,10)</b>	<p>Rumah Perempuan Kupang (RPK) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang untuk lebih memperketat pengawasan terhadap Perusahaan Pengarah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Pasalnya, banyak PPTKIS yang resmi, tetapi dalam proses perekrutan tenaga kerja (Naker), masih banyak yang bermasalah. "Masih banyak PPTKIS yang resmi, tetapi dalam perekrutan tenaga kerja masih melakukan manipulasi administrasi atau identitas para naker, seperti, penipuan usia pekerja, nama, dan tempat tinggal. Karena itu, Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Nakertrans, dan Dispenduk harus melakukan pengawasan ketat," kata Direktris Lembaga RPK, Libby SinlaEloE usai rapat pelaksanaan program penanganan <i>trafficking</i> di Kantor RPK, Senin (7/7).</p> <p>Libby yang saat itu didampingi empat kepala divisinya, yakni Imelda Dalli, Rahmawati Bagang, Theresia Siti dan Esther Mantaon, menjelaskan, penanganan dan pendampingan kasus <i>trafficking</i> yang ditangani RPK, selama Januari - Juli 2014, berjumlah 54 orang. Mereka ini berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, TTS, Belu, dan Sumba Barat Daya. "Mereka yang didampingi ini rata-rata direkrut oleh PPTKIS yang resmi. Tetapi tenaga kerja yang direkrut bermasalah dalam identitas seperti anak berusia dibawah umur, nama tidak jelas dan tempat tinggal serta administrasi lainnya," katanya.</p>
6	<b>Selasa, 15 Juli 2014</b>	<b>Memprihatinkan, Kondisi TKI NTT Korban Trafficking (TE, Hal: 1,7)</b>	<p>Setidaknya 20 TKI korban perdagangan manusia, ditampung di tempat penampungan sementara aula Gereja Katholik Santa Petrus. Kondisi mereka sangat memprihatinkan. Mereka terbanyak berasal dari Kupang-NTT. Senin (14/7) kemarin, Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo mendadak mengunjungi mereka. Wajah Soerya mendadak terharu usai mendengar keluh kesah dari TKI wanita yang kebanyakan berasal dari NTT tersebut. Satu persatu korban disalami dan dirangkulnya.</p> <p>Ke-20 korban tersebut, rencananya akan dipulangkan ke kampung halamannya hari ini, Selasa (15/7). Dalam pesannya, Soerya meminta agar kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi TKI yang akan berangkat keluar negeri. "Kejadian kemarin semoga menjadi pengalaman yang tidak perlu terulang lagi tidak hanya bagi adik-adik semua. Tapi bagi seluruh TKI yang akan berangkat ke luar negeri,"ujarnya.</p>

			<p>Untuk itu, sebelum berangkat, ia meminta agar seluruh kelengkapan administrasi, tenaga penyalur diperhatikan betul oleh para calon TKI tersebut. Sehingga, nantinya para calon TKI dapat bekerja dengan tenang. Tak hanya itu, ia langsung memberikan bantuan dari saku pribadinya kepada para TKI tersebut.</p>
7	<b>Kamis, 17 Juli 2014</b>	<b>TKW NTT Diberi Obat Perusak Saraf Otak (PK, Hal: 5)</b>	<p>Yorita Nomleni (23), tenaga kerja wanita asal Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, diduga sempat diberi obat perusak saraf otak. Sebelumnya, dia pun disiksa oleh majikan di tempatnya bekerja, polisi, dan petugas imigrasi Selangor, Malaysia.</p> <p>Hal tersebut disampaikan Koordinator <i>Justice Piece and Integrity Creation</i> (JPIC) SVD Timor, Pater Piter Bataona, Rabu (16/7/2014), se usai menjemput dan mengantar Yorita bertemu dengan ibu kandung dan saudara-saudaranya di Kupang.</p> <p>"Sesuai dengan pengakuan Yorita, awalnya dia (Yorita) disiksa oleh majikannya sehingga karena tak tahan, dia lantas melaporkan kejadian itu ke polisi setempat. Bukannya ditolong, polisi justru malah menyiksa dia selama satu minggu dan disuruh guling-guling di lantai, sampai Yorita mengalami depresi hebat," kata Piter.</p> <p>"Setelah puas menyiksa Yorita, polisi lantas menyerahkannya ke petugas imigrasi untuk dideportasi karena bersamaan dengan selesainya visa kerja Yorita. Saat berada di tangan petugas imigrasi, justru perlakuan lebih keji yang dialaminya. Dia disuruh telan pil yang belakangan diketahui adalah obat perusak saraf di bagian otak. Setelah minum pil itu, Yorita pun tidak ingat apa-apa lagi, termasuk namanya sendiri," sambung Piter.</p> <p>Menurut Pater Piter, pengakuan Yorita itu sama persis dengan apa yang diampaikan oleh sejumlah rekan Pater Piter di Pangkal Pinang yang mengatakan kalau para TKI yang dideportasi akan diberi obat yang efeknya akan merusak jaringan otak.</p> <p>"Namun jika dibandingkan antara polisi Malaysia dan polisi imigrasi Malaysia, yang paling kejam itu petugas polisi imigrasinya. Teman-teman di Selangor juga mengakui hal itu, termasuk petugas polisi imigrasi Selangor," ungkap Piter.</p> <p>Piter berharap Pemerintah Indonesia bisa segera membantu menyelesaikan persoalan tersebut karena hal ini sudah menjadikejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Sebelumnya diberitakan, Yorita Nomleni akhirnya tiba di Kupang, NTT, Selasa (15/7/2014), dan bertemu kembali dengan keluarganya. Perjuangan Yorita untuk pulang ke kampung halaman ini berliku. Dia mendapatkan bantuan antara lain dari suster-suster FMM, <i>Justice Piece and Integrity Creation</i> (JPIC) SVD Timor, dan</p>

			<p>JPIC CIJ.</p> <p>"Proses pemulangan Yorita ke Indonesia dilakukan sejak bulan Maret 2014 lalu melalui Batam, Kepulauan Riau, dan dia tinggal beberapa saat di Bambu Apus, Jakarta, dengan kondisi yang tidak normal," tutur Piter, Selasa malam.</p>
8	<b>Jumat, 18 Juli 2014</b>	<b>Satpol PP Amankan Delapan TKI Ilegal (VN, Hal: 11)</b>	<p>Satuan Tugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Belu mengamankan sedikitnya 8 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang diduga hendak berangkat ke Malaysia, Dari delapan orang itu, dua di antaranya diduga sebagai calo, yaitu Lambertus Hale (LH) bersama istrinya. Penggagalan kepergian para TKI itu dilakukan di Halilulik, Kecamatan Tasifeto Barat, Rabu (16/7) malam. Saat itu, mereka sudah menumpang bus antar kota dalam provinsi (AKDP) Paris Indah.</p> <p>Demikian dijelaskan Kasatpol PP Nikolaus Umbu K Biri kepada VN di Atambua, Kamis (17/7). Biri menerangkan proses kegagalan kepergian kedelapan TKI ilegal itu berhasil dilakukan berkat informasi dari masyarakat soal adanya dugaan perekrutan TKI ilegal oleh Lambertus Hale (LH). "Dia (LH, red-) bersama istrinya merekrut enam orang tanpa dokumen yang sah. Malahan, salah satu di antaranya masih di bawah umur. Kita tahu hal ini setelah interview LH. LH bilang hanya bawa mereka ke Kalimantan Tengah tapi tidak satu orang pun yang memiliki KTP," ujarnya.</p> <p>"Akhirnya, kita amankan mereka dan hari ini (Rabu), kita serahkan mereka ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnakertrans) Belu untuk urus lebih lanjut. Intinya bahwa kita sudah jalankan tugas sesuai dengan aturan yang diamanatkan dalam Perda Belu soal TKI," ungkapnya.</p> <p>Sekretaris Disosnakertrans Belu Embang Bela mengatakan pihaknya sudah menerima kedelapan orang TKI ilegal itu dari Satpol PP dan sudah melakukan interview. Ternyata, mereka tidak memiliki identitas diri atau dokumen resmi.</p> <p>"Kita duga ada dua orang calo, yaitu LH bersama istrinya yang berencana berangkatkan enam orang lainnya ke Kalimantan Tengah untuk kemudian diteruskan ke Malaysia. Tapi, kita tidak punya wewenang untuk selidiki ini lebih lanjut karena sudah masuk ranah hukum. Jadi, kita serahkan mereka ke Polres untuk diproses hukum saja," jelasnya.</p> <p>Nanti dalam proses penyelidikan pihak kepolisian, kata Bela, pasti akan terkuak siapa calo atau pelaku perekrutan keenam TKI itu. Soalnya, keberangkatan mereka tidak diketahui oleh aparat pemerintah desa, juga tanpa dokumen resmi.</p> <p>"Setelah kita cek, ternyata ada yang dari Lamaknen, Kakuluk Mesak dan Atambua Selatan. Semuanya tidak punya identitas diri jadi biar kita serahkan ke polisi saja supaya usut dan ungkap kedua calo yang diduga sebagai pelaku perekrutan," ujarnya.</p>



9	<p><b>Jumat, 18 Juli 2014</b></p>	<p><b>Masalah TKI Tanggung Jawab Bersama (VN, Hal: 8)</b></p>	<p>Maraknya perekrutan tenaga kerja yang tidak prosedural oleh pihak-pihak tertentu, dan kerap kali menimbulkan masalah, bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, persoalan itu menjadi tanggung jawab bersama, baik masyarakat, pemerintah, kepolisian dan juga lembaga Rumah Perempuan Kupang yang sering menangani masalah <i>trafficking</i>. Hal ini dikatakan Kapolres Kupang AKBP Dominicus Savio Yepormase, saat membuka acara <i>workshop</i> penegakan hukum terhadap kasus tenaga kerja yang diselenggarakan lembaga Rumah Perempuan Kupang bersama Yayasan Tifa dengan Polres Kupang di Aula Polres Kupang, Kamis (17/7). Kegiatan ini dihadiri Kasat Reskrim Polres Kupang Iptu Mohamad Dwi Ramadhanto, Kapolsek dan Unit PPA Polres Kupang. Kapolres mengatakan <i>workshop</i> yang digelar bisa meningkatkan sinergitas antara pihak kepolisian dalam penanganan masalah TKI yang terjadi di wilayah Kabupaten Kupang.</p>
10	<p><b>Jumat, 18 Juli 2014</b></p>	<p><b>Tim Gabungan Cokok TKI Ilegal Dari Belu (PK, Hal: 14)</b></p>	<p>Tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Kesbangpol dan Dinas Nakertrans Kabupaten Belu, Rabu (16/7/2014), sekitar pukul 19.45 wita, berhasil menggagalkan pengiriman calon TKI ilegal asal Belu dengan tujuan Kalimantan. Calon TKI sebanyak 8 orang itu sudah diangkut menggunakan bus dan ketika di tahan mereka tidak mengantongi dokumen resmi sehingga diamankan bersama oknum calo, untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Belu guna diproses sesuai hukum yang berlaku. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Belu, Silvester Suyarno, dan Sekertaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Belu, Embang Bela menyampaikan hal ini kepada Pos Kupang di Atambua, Kamis (17/7/2014).</p>
11	<p><b>Sabtu, 19 Juli 2014</b></p>	<p><b>Pertikaian Perwira Polda “Makan Korban” (VN, Hal: 3)</b></p>	<p>Pertikaian yang diduga terjadi antara Direskrimsus dan Direskrim Polda NTT terkait penanganan terhadap 52 calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) ternyata memakan korban, Sejumlah anak buah Direskrimsus dikabarkan dimutasi ke Polres-Polres karena Direskrimsus Kombes Mochammad Slamet “cuci tangan”. Kombes Slamet bahkan menganggap anak buahnya menyalahgunakan surat perintah (Sprin) yang ditandatangani dirinya. Bukan hanya itu, anak buah Direskrimsus Polda NTT dinilai merupakan para pemain yang sering mempermainkan kasus-kasus terkait dengan perdagangan manusia. Anggota Direskrimsus yang mendapat teguran dari komandannya adalah AKBP Teja Lasmana. Sedangkan AKP I Gede Sucitra, Ipda Adriana Hurint, Aiptu Djoni Boro, Brigpol Diktus M Abor, Brigpol Rudi Soik, dan Briptu A Sellyana Dimu bakal dimutasi. Kasus tersebut bermula saat penangkapan 52 calon TKI yang dilakukan oleh AKBP Teja Lasmana bersama anak buahnya. Penangkapan terhadap 52 calon TKI PT Malindo Mitra Perkasa membuat berang Direskrim Kombes Samuel Kawangian.</p>

			<p>Kawangian beranggapan bahwa penangkapan tersebut di luar kewenangan Direskrimsus. Padahal, para anak buah Direskrimsus melaksanakan tugas berdasarkan surat perintah tugas yang ditandatangani Kombes (Pol) Mochammad Slamet, melalui surat perintah Nomor: SP. Gas/02/1/2014/ Direkrimsus. Dalam surat itu diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan data dugaan tindakan pidana di bidang tindak pidana tertentu (Tipiter) di wilayah hukum Polda NTT. Ironisnya, Direskrimsus Polda NTT Kombes Mochammad Slamet, ketika dikonfirmasi Kamis (17/7) mengatakan, dirinya tidak pernah memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan perizinan PT Malindo Mitra Perkasa.</p> <p>Apalagi perintah menangkap calon TKI, karena bukan wilayah dan bidang tugas Dirkrimsus. "Bukan tugas Krimsus penangkapan 52 CTKI tersebut," tegas Slamet. Ditegaskan Slamet, AKBP Teja Lasmana, AKP I Gede Sucitra, Ipda Adriana Hurint, Aiptu Djoni Boro, Brigpol Diktus M Abor, Brigpol Rudi Soik, dan Briptu A Sellyana Dimu menyalahgunakan sprin tugas rutin Tipiter.</p> <p>Akibat tindakan AKBP Teja dan kawan-kawan tersebut AKBP Teja sudah mendapat teguran. Terpisah, Direskrimum Polda NTT Kombes Samuel Kawangian, membantah adanya pertikaian antara dirinya dengan Direskrimsus Kombes Mochammad Slamet.</p>
12	<b>Sabtu, 19 Juli 2014</b>	<b>Polres Gagalakan Pemberangkatan 49 TKI (VN, Hal: 12)</b>	<p>Aparat Kepolisian Resor (Polres) Timor Tengah Utara (TTU) berhasil mengagalkan pemberangkatan 49 tenaga kerja bersama enam orang balita saat hendak menuju Kupang, dan selanjutnya menuju Kalimantan Tengah.</p> <p>Kapolres TTU AKBP I Gede Mega Suparwitha ketika di wawancarai mengatakan, pihaknya berhasil menahan para tenaga kerja yang hendak di bawa ke Kalimantan Tengah pada, Kamis (17/7) tengah malam, dengan tiga bus umum.</p> <p>Menurutnta eksploitasi tenaga kerja di NTT seakan sudah menjadi tradisi. Tak heran jika Provinsi NTT dikenal sebagai lumbung penyuplai tenaga kerja antar daerah maupun luar negeri.</p>
13	<b>Minggu, 20 Juli 2014</b>	<b>Polisi Bekuk 62 Orang Calon TKI (PK, Hal: 4)</b>	<p>Sebanyak 62 orang yang berasal dari Atambua (Belu) dan Insana (TTU), Kamis (17/7/2014), sekitar pukul 00.30 wita dibekuk aparat kepolisian Polres TTU. Mereka hendak diberangkatkan ke Kalimantan untuk dipekerjakan pada sebuah perusahaan.</p> <p>"Tadi malam (Kamis malam) sekitar pukul 00.30 wita, ada tiga kendaraan yang lewat di sini (Kefamenanu) dan mencurigakan. Setelah diperiksa ternyata mereka itu mau ke Kupang dan terus ke Kalimantan. Ada anak-anak kecil dan perempuan. Makanya kita periksa," ujar Kapolres TTU, I Gede Mega Suprawitha, di ruang kerjanya, Jumat (18/7/2014) siang.</p> <p>Mega mengatakan, pihaknya tidak bermaksud melarang warga untuk bekerja di luar daerah, namun</p>

			<p>harus sesuai aturan dan administrasi yang lengkap. "Sekarang masih dalam tahap kajian, apa sudah benar mekanismenya atau tidak. Kita tidak bisa melarang orang mau ke Kalimantan. Namun orang itu harus siap. Sekarang kita periksa memang sebelum mereka direkrut untuk kerja di sana," tutur Mega. Ditanya soal perusahaan atau oknum yang merekrut para pekerja tersebut, Mega mengaku belum sepenuhnya tahu. "Ada perusahaan dari Kalimantan sana, saya belum tahu kejelasan perusahaan itu. Jadi saya tidak bisa percaya begitu saja sebelum bukti dokumen ada. Kita juga sudah beritahu, beri pengarahan supaya bisa tahu apa risikonya kalau tidak ada persiapan administrasi, KTP, surat domisili. Jangan sampai susah di sana, baru ribut-ribut. Jadi, kita sudah panggil kepala desa masing-masing," tambah Mega.</p>
14	<p><b>Senin, 21 Juli 2014</b></p>	<p><b>Pekerja Perempuan NTT Rentan Kekerasan (VN, Hal: 7)</b></p>	<p>Pekerja perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, gaji yang tidak dibayar, bahkan dijual (<i>trafficking</i>). Penyebabnya karena banyak tenaga kerja perempuan asal NTT yang bekerja di luar negeri tidak dibekali pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Demikian dikatakan Direktris Rumah Perempuan Kupang (RPK) Libby SinlaEloE di sela-sela rapat internal membahas penanganan kasus <i>trafficking</i> di Rumah Perempuan Kupang, Sabtu (19/7).</p> <p>Dia mengatakan, penanganan persoalan TKI dibutuhkan kerja sama aktif semua elemen terkait. Contohnya, Rumah Perempuan Kupang, dalam penanganan persoalan tenaga kerja terus membangun koordinasi didukung Yayasan Tifa.</p> <p>Kerja sama juga dibangun dengan kepolisian, pemerintah, dan masyarakat dalam hal pembentukan gugus tugas di tingkat desa. "Koordinasi sampai ke tingkat desa untuk melakukan pengawasan mulai dari perekrutan, penampungan, penempatan, dan purna penempatan," ujarnya.</p> <p>Dia menuturkan, berdasarkan data penanganan dan pendampingan kasus <i>trafficking</i> oleh Rumah Perempuan Kupang, sejak Januari hingga Juli 2014, sebanyak 54 orang telah didampingi. Mereka berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, TTS, Belu dan Sumba Barat Daya.</p> <p>Mereka yang didampingi ini rata-rata direkrut oleh PJTKI yang resmi. Namun, dalam proses perekrutan sering identitas anak dimanipulasi seperti anak bawah umur, nama dan tempat tinggal tidak jelas.</p>
15	<p><b>Senin, 21 Juli 2014</b></p>	<p><b>Tuntaskan Semua Kasus TKI (VN, Hal: 8)</b></p>	<p>Penanganan Kasus Tenaga Kerja Indonesia di wilayah Polres Kupang dilakukan cepat dan tepat. Buktinya sudah lima kasus yang ditangani Polres Kupang saat ini sudah mulai di sidangkan.</p> <p>Kapolres Kupang AKBP Dominicus Savio Yempormase melalui Kasat Reskrim Iptu. Ramadhantio kepada koran ini, Jumat (18/7) memastikan telah menangani lima kasus TKI. "Dari lima kasus itu dua</p>

			<p>kasus sudah P-21 sementara tiga lagi dalam pemberkasan,” kata Ramadhantio.</p> <p>Tiga kasus itu jelas dia, yakni kasus yang melibatkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kupang Gustaf Taopan dan Benny Malelak, dan satu tersangka lainnya.</p> <p>Ia memastikan Polres Kupang akan mengusut tuntas kasus <i>trafficking</i> ini, dan tidak melakukan pembiaran terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap TKI. “Dalam waktu dekat semua berkas akan kita lengkapi sebelum di limpahkan ke pengadilan,” ujarnya.</p>
16	<b>Rabu, 23 Juli 2014</b>	<b>Polisi Masih Dalam Delapan Kasus TKI Ilegal (PK, Hal: 15)</b>	<p>Penyidik Polres Belu masih mendalami kasus penahanan delapan warga yang diduga menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) oleh tim gabungan Satpol PP Belu, Badan Kesbangpol dan Dinas Nakertrans Belu. Pendalaman ini dilakukan guna mendapatkan kepastian apakah para TKI ini mengantongi dokumen resmi atau tidak, dan apakah tujuannya bekerja di Kalimantan atau ada agenda lain untuk bekerja ke Malaysia.</p> <p>Kapolres Belu, AKBP Daniel Yudo Ruhoro, menyampaikan hal ini kepada wartawan di Atambua, Senin (21/7/2014). Daniel mengakui, pihaknya sudah menerima penyerahan delapan orang TKI asal Belu bersama dokumen yang dikantongi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Belu.</p> <p>Langkah yang diambil polisi adalah telah mengambil keterangan baik para TKI maupun oknum calo yang merekrut mereka. Keterangan dari para TKI ini penting untuk pengembangan penyelidikan guna mengetahui secara jelas apakah proses perekrutan sesuai prosedur atau tidak. Dan, apakah dokumen yang dipegang para TKI betul-betul legal atau ilegal, termasuk daerah tujuan apakah sesuai dengan pengakuan ke Kalimantan atau ada modus lain dibalik ini.</p> <p>"Kita masih kembangkan penyelidikan. Masih ambil keterangan para TKI. Kita belum bisa menyimpulkan apakah ada pelanggaran prosedur atau tidak. Nanti dari keterangan itulah barulah kita tahu duduk persoalannya," kata Daniel.</p>
17	<b>Kamis, 24 Juli 2014</b>	<b>Bersihkan Polisi Nakal (VN, Hal: 2)</b>	<p>Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTT Brigjen I Ketut Untung Yoga Ana diminta untuk segera mengambil tindakan dan membersihkan oknum-oknum polisi nakal di institusi tersebut sehingga masyarakat bisa mempercayai salah satu lembaga penegak hukum itu. Karena perlawanan Brigpol Rudi Soik, anggota Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTT terhadap Dir Reskrimsus Kombes (Pol) Mochammad Slamet memberikan petunjuk bahwa ada sesuatu yang salah dalam institusi tersebut. Demikian inti sari percakapan VN dengan Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT-NTB Darius Bada Baton, Rabu (23/7). “Peristiwa ini menjadi preseden buruk bagi institusi Polda NTT dalam memberikan pelayanan kepada publik. Karena itu, Kapolda NTT harus mengambil sikap tegas dan jangan memihak. Kapolda harus adil dan bijak demi institusi, bukan</p>

			<p>oknum,” harap Darius. Darius mengatakan, dalam konteks perlawanan anak buah kepada atasan, sepanjang dilandasi hak-hak konstitusional dan terkait dengan tugas dan tanggung jawab, perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan institusi.</p> <p>“Karena itu, Ombudsmen sudah bersurat kepada Kapolda NTT supaya dicari solusi yang seadil-adilnya,” tegas Darius. Darius menambahkan, kejanggalan kalau tidak mau disebut kebobrokan oknum anggota polisi di semua level, sudah merupakan rahasia umum.</p> <p>Dengan demikian, manakala ada anggota yang berani membukakan itu kepada publik, patut diberikan apresiasi. Sehingga, marwah institusi kepolisian semakin dikagumi oleh masyarakat.</p> <p>Terpisah, Direktur Profesi dan Pengamanan (Dir Propam) Polda NTT Kombes (Pol) Jhon Efri mengaku telah menerima surat dari Ombudsman Perwakilan NTT-NTB tersebut.</p>
18	<b>Kamis, 24 Juli 2014</b>	<b>BNP2TKI: Jangan Jadi TKI Kaburan (VN, Hal: 11)</b>	<p>Fenomena tenaga kerja Indonesia (TKI) kaburan yang cukup tinggi di luar negeri mendapat perhatian khusus dari Sekretaris Utama BNP2TKI, Edy Sudibyo. Fenomena TKI kaburan ini banyak terjadi di hampir semua negara.</p> <p>“Jangan Jadi TKI Kaburan. Ingat kalau ada masalah segera hubungi Kantor KBRI/KJRI di negara anda bekerja atau Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) Taiwan,” ujar Sestama Edy Sudinyo ketika diskusi tentang Permasalahan TKI di luar negeri pada kegiatan Pembekalanan Akhir Pemberangkatan (PAP) di kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Serang, Banten, Rabu (23/7).</p> <p>Sestama Edy Sudibyo berada di Tangerang dalam rangka mendampingi Kepala BNP2TKI, Gatot Abdullah Mansur pada kegiatan rangkaian akhir perjalanan Safari Ramadhan BNP2TKI Tahap III di wilayah Provinsi Banten.</p> <p>BNP2TKI, kata Edy, memastikan bahwa setiap TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri harus terlebih dahulu mengikuti seleksi mulai dari pendataan di Disnaker setempat, pemeriksaan kesehatan, pelatihan di BLK Luar Negeri dan mengikuti kegiatan Pembekalanan Akhir Pemberangkatan (PAP).</p> <p>Ada 4 Materi PAP yang diajarkan mulai dari Perjanjian Kerja (PK), Mental dan Budaya, Perundang-Undangan dan masalah Narkotika dan Penyakit Menular Seksual (PMS). “PAP ini wajib diikuti sebelum TKI mendapatkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN),” paparnya.</p> <p>Karena itu, kata Edy, TKI yang menempuh jalur prosedural ini diharapkan sehat jasmani dan rohaninya, telah memiliki skill dan ketrampilan menggunakan peralatan kerja hingga menguasai dasar-dasar penguasaan bahasa asing.</p>

			Sementara. Jika TKI berangkat di luar jalur resmi bisa dipastikan di negara penempatan akan mengalami permasalahan. Diakui Edy, permasalahan itu bisa muncul kepada siapa saja. Karena itu, penting untuk menyimpan nomor telepon kantor perwakilan pemerintah RI di mana anda bekerja.
19	<b>Kamis, 24 Juli 2014</b>	<b>Tifa Dorong Lembaga Keuangan Bantu TKI (VN, Hal: 12)</b>	<p>Menyikapi aneka persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, terutama dalam hal pengelolaan keuangan, Yayasan TIFA dan PPSE Keuskupan Atambua menandatangani nota kesepahaman atau <i>memorandum of understanding</i> (MoU) dengan BRI, BNI, dan Koperasi Kredit Kasih Sejahtera.</p> <p><i>Access to Finance Specialist Poverty Reduction through Safety in Immigration</i> TIFA Indonesia Khres Senduk menyampaikan hal itu kepada VN sesuai penandatanganan MoU yang berlangsung di Hotel Permata, Rabu (23/7) kemarin.</p> <p>Senduk menjelaskan Yayasan TIFA sebagai lembaga pendamping TKI (buruh migran) bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mengenalkan produk penyimpanan uang bagi TKI. Pasalnya, selama ini, TKI yang bekerja di luar negeri sering mengalami kesulitan dalam mengakses layanan keuangan.</p> <p>Kiriman uang mereka ada yang tidak sampai, sehingga perlu dijamin lembaga keuangan. Menurut Senduk, sesungguhnya kerja sama TIFA dan PPSE Keuskupan Atambua dengan lembaga keuangan itu, untuk memenuhi kebutuhan TKI dan keluarganya.</p> <p>“Kita ingin pengelolaan keuangan mereka jauh lebih baik. Mereka tidak perlu simpan uang di rentenir/ rekening orang lain sehingga uang mereka selamat. Akses tabungan pun bisa dijamin. Pinjaman uang pun bisa didapat dengan biaya murah,” ungkapnya.</p> <p>Kepala Cabang BRI Atambua Ronald Roho mengatakan, kerja sama yang dilakukan pihaknya dengan TIFA dan PPSE Keuskupan Atambua sesungguhnya untuk membuat produk tabungan bagi para TKI. Dan, yang paling penting adalah menjamin keuangan mereka.</p>
20	<b>Kamis, 24 Juli 2014</b>	<b>Polres TTU Komitmen Tuntaskan Masalah TKI (VN, Hal: 12)</b>	<p>Kepolisian Resor (Polres) Timor Tengah Utara serius mengusut tuntas kasus pemberangkatan puluhan tenaga kerja ilegal asal Kabupaten Belu yang digagalkan pekan lalu. Kapolres Timor Tengah Utara AKBP I Gede Mega Suparwitha menyampaikan hal itu kepada VN Rabu (23/7), di Kefamenanu.</p> <p>Menurut Suparwitha, hingga kini oknum pengerah tenaga kerja dan ketiga unit bus pengangkut para tenaga kerja masih diamankan di Polres TTU dalam rangka pengusutan kasus hukumnya.</p> <p>Sementara para tenaga kerja, kata dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemkab Belu dan dipulangkan, karena proses keberangkatan tidak sesuai mekanisme. “Pelaku yang merekrut para</p>

			<p>tenaga kerja tersebut berinisial H. Saat ini masih di tahan penyidik Polres TTU guna pemeriksaan lebih lanjut.</p> <p>Begitu pula tiga unit mobil pengangkut diamankan sebagai alat bukti," kata Kapolres. Dikatakan Kapolres, beragam fenomena telah mendera TKI yang bekerja di luar negeri. Bahkan berbagai bentuk kekerasan bagi para tenaga kerja menjadi langganan setiap waktu.</p> <p>Fenomena itu, kata Kapolres, terjadi lantaran kurang sadarnya TKI mengenai permasalahan tenaga kerja serta berbagai bentuk permainan yang dilakukan oknum maupun perusahaan pengarah dan perekrut tenaga kerja, sehingga melanggengkan kebiasaan yang melanggar hukum. Oleh karenanya, tambah Kapolres, pihaknya akan tetap melakukan pemantauan terhadap perusahaan dan oknum pengarah tenaga kerja nakal, yang hanya mengais keuntungan dari ketidaktahuan para calon TKI.</p>
21	<b>Kamis, 24 Juli 2014</b>	<b>Danlanud Gagalkan Pengiriman 3 CTKI Ilegal (TE, Hal: 9,10)</b>	<p>Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) El Tari Kupang terus melakukan pengawasan terkait pengirim Calon TKI (CTKI) melalui Bandara El Tari Kupang. Pengawasan dilakukan terhadap internal anggota Lanud, maupun masyarakat biasa.</p> <p>Danlanud El Tari, Kolonel Pnb Andi Wijaya, dalam <i>pers release</i> yang diterima koran ini, Selasa (22/7), menjelaskan, selama tiga bulan menjabat sebagai Danlanud El Tari, dirinya intens melakukan monitoring. Hasilnya, tidak ditemukan personel Lanud El Tari, yang terlibat pengiriman TKI baik secara resmi maupun tidak resmi. Justru sebagai tindakan preventif, Lanud El Tari memeriksa dan mengawasi personel di bandara El Tari, agar taat hukum dan dapat menjadi contoh.</p> <p>Selain memeriksa personil, pihaknya juga memonitoring pengiriman TKI secara illegal ke luar NTT, melalui Bandara El Tari, oleh masyarakat sipil lainnya.</p> <p>Berdasarkan pemantauan dan monitoring, Senin (21/7) lalu, Lanud El Tari melalui satuan yang menangani masalah CTKI, menggagalkan pengiriman tiga calon TKI secara ilegal, sekira pukul 04.00 wita, menggunakan pesawat Lion Air, menuju Batam dan Jakarta. "Ini merupakan bukti konkret dari keseriusan Lanud El Tari, dalam memberantas penyelundupan TKI yang tidak menggunakan surat resmi atau ilegal. Dan bagi mereka yang ikut terlibat dalam pengiriman TKI ini, akan diproses secara hukum, dengan tujuan agar para oknum-oknum tersebut jerah akan mengulangi tindakannya yang dapat merugikan orang lain," tulis Kol. Pnb. Andi Wijaya.</p>
22	<b>Kamis, 24 Juli 2014</b>	<b>Pemkab Belu Gagalkan Pengiriman Tenaga Kerja Ilegal (TE, Hal:13)</b>	<p>Tim gabungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu yang terdiri dari Sat Pol PP, Badan Kesbangpol dan Dinas Nakertrans, Rabu (16/7) malam berhasil menggagalkan pengiriman delapan orang tenaga kerja ilegal ke Kalimantan Tengah.</p> <p>Delapan orang tenaga kerja ilegal asal Kampung Haliren Kelurahan Manuaman Kecamatan Atambua</p>

			<p>Selatan itu digagalkan keberangkatannya oleh tim gabungan di terminal bayangan Halilulik saat akan diberangkatkan dengan bus Paris Indah jurusan Atambua-Kupang sekira pukul 19.45 Wita bersama Densy Leto, karyawan PT Mulia Agro Permai Kalimantan Tengah.</p> <p>Kedelapan tenaga kerja itu diantaranya Lambertus Hale dan Henderikus Hale. Mereka diamankan tim gabungan Pemkab Belu karena diketahui tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dari pejabat pemerintah.</p> <p>"Kami dapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang warga yang sedang berkumpul di rumah salah seorang warga dan akan diberangkatkan sebagai TKI ke Malaysia. Jadi kami koordinasi dengan Kesbangpol dan Nakertrans. Setelah itu langsung bergerak ke rumah warga dimaksud, ternyata mereka sudah berangkat dengan bus Paris Indah, sehingga kami kejar dan dapat mereka di Halilulik," ungkap Kabid Penegakan Hukum dan Perundang-undangan Sat Pol PP Belu, Silvester Suyarno kepada wartawan di Atambua, Kamis (17/7).</p>
23	<b>Sabtu, 26 Juli 2014</b>	<b>Polda NTT Sarang Mafia Trafficking (VN, Hal: 3)</b>	<p>Kepolisian Daerah (Polda) NTT diduga sebagai sarang mafia perdagangan manusia (<i>Human trafficking</i>), karena selama ini kasus perdagangan manusia yang dilaporkan ke Polda NTT tidak pernah dituntaskan.</p> <p>Penegasan itu dikemukakan anggota DPD RI Sarah Lerry Mboeik dalam jumpa pers yang digelar di Kupang, Jumat (25/7). Saat jumpa pers Sarah ditemani koordinator anti korupsi PIAR NTT Paul SinlaEloE. "Aparat kepolisian yang ada pada lingkungan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) NTT diduga terlibat bahkan menjadi pelaku mafia perdagangan manusia yang saat ini marak terjadi di NTT," kata Sarah.</p> <p>Sarah menyampaikan, dirinya telah mengantongi beberapa dokumen penting terkait kasus perdagangan manusia yang ditangani Polda NTT. Selain itu ada banyak kasus perdagangan manusia yang telah dilaporkan dirinya bersama PIAR NTT sejak tahun 2011 sampai 2014 ini, namun kasus-kasus tersebut hilang tanpa jejak penyelesaian atau kepastian hukum.</p> <p>Dirinya mengingatkan kasus penangkapan 52 orang tenaga kerja ilegal bulan Januari 2014 lalu dan penangkapan 11 orang tenaga kerja pada bulan Juni yang lalu, paska penangkapan tersebut, jelas dia, tidak ada kejelasan sejauh mana penyelesaian atau upaya proses penyelesaian kasus tersebut.</p> <p>"Kasus-kasus penjualan manusia yang ditangani Polda NTT itu hilang jejak tidak ada penyelesaian yang jelas. Saya curiga ada oknum polisi baik perwira maupun anggota biasa yang terlibat dalam sindikat mafia penjualan manusia. Sehingga kasus-kasus yang terjadi tidak ada penyelesaian yang</p>



			<p>jelas," terangnya.</p> <p>Kecurigaannya terhadap aparat Mapolda NTT dalam mafia penjualan manusia yang terjadi di NTT semakin menguat dengan adanya perselisihan antara Direskrim dan Direskrimsus Polda NTT. Bagi Sarah, perselisihan atau permasalahan antara ke dua petinggi Polda NTT tersebut sebagai bukti yang menguat dugaan adanya keterlibatan aparat Polda NTT dalam semua kasus penjualan manusia yang terjadi.</p> <p>Dirinya menduga antara pihak yang berselisih merebut lahan bisnis yang diduga bisnis penjualan manusia. Atas semua persoalan tersebut dirinya dalam kapasitas sebagai anggota DPD RI mengaku, akan menyampaikan semua persoalan yang ada beserta semua dokumen tersebut kepada mitra DPD RI yang ada di Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung.</p> <p>Sehingga semua ketidakjelasan kasus yang terjadi bisa mendapat perhatian dari lembaga hukum yang ada di tingkat pemerintahan Pusat. Pasalnya dalam kasus yang terjadi ada indikasi penyelewengan kekuasaan oleh aparat Polda NTT yang melanggar UU Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan sanksi minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara dan denda minimal Rp. 140 sampai Rp. 800 juta dan pidana tambahan pemberhentian dari dinas kepolisian.</p>
24	<b>Minggu, 27 Juli 2014</b>	<b>Lima Wanita Ngada Hilang dari Rumah (PK, Hal: 3)</b>	<p>Lima perempuan asal Kabupaten Ngada dan Nagekoe dikabarkan hilang dari kediaman orangtuanya, Senin (14/7/2014). Kabarnya mereka dibawa oleh pengemudi truk ekspedisi dari Bajawa ke Pulau Jawa, Gregorius Pinga Longa (33).</p> <p>Belum sempat kelima perempuan itu disalurkan ke lokasi penampungan, pelaku yang membawa kelima perempuan itu keburu diamankan seorang anggota Brimob asal Ngada yang menerima pengaduan keluarga korban. Gregorius bersama kelima perempuan itu diamankan oleh Polres Cirebon.</p> <p>"Anggota sudah berangkat ke Cirebon menjemput pelaku dan korban. Saat ini mereka dalam perjalanan menuju ke Bajawa," Kapolres Ngada, AKBP Bertholomeus I Made Oka Putra, S. IK, dikonfirmasi Pos Kupang, Jumat, (25/7/2014) di Bajawa. Kelima korban itu dilaporkan hilang dari kediaman oleh orangtuanya. Mereka tak memiliki selebar dokumen perjalanan atau dokumen lainnya untuk mengadu nasib di tempat lain.</p>
25	<b>Kamis,</b>	<b>Rekrut TKW, Rebeca Ledoh Disidangkan</b>	<p>Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Kupang, mulai menyidangkan perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (<i>human trafficking</i>) dengan terdakwa, Rebeca Oematan Ledoh.</p>

	<p><b>31 Juli 2014</b></p>	<p><b>(TE, Hal: 9,10)</b></p>	<p>Perkara ini disidangkan setelah resmi dilimpahkan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Kupang, Wisnu Wardana, dan terintegrasi dengan nomor perkara 173/PID.B/2014/PN.KPG.</p> <p>Dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan, Wisnu Wardana menyebutkan terdakwa telah dengan sengaja melakukan perekrutan tenaga kerja secara illegal, yang kemudian dikirim ke perusahaan sarang burung walet di Medan. Namun, selama bekerja mereka disekap dan dieksploitasi hingga mengakibatkan Marny Baun dan Rista Bota meninggal dunia.</p> <p>Terdakwa semula diberitahu oleh Ris Nggeon kalau perusahaan sarang burung walet milik Mohar tersebut, membutuhkan tenaga kerja.</p> <p>Atas informasi itu, terdakwa merekrut tenaga kerja masing-masing Erdina Ndun, Damaris Nggeon, Fince Y. Ndal, Erni Aning, Enita Taek, Deli Fone, Elisabeth Funan, Norce Benu, Katerina Bako, Sutri Bani, Maria Fatima Bui, Citra Wati Nalle, Feronika Fatbanu, Yanuarua Abuk, Dianti Lasveto, Yuliana Seuk, Feni Tobe, Antri Adolfin Tob, Yeny Fenakan, Yasinta Tefa, Rista Bota, dan Maria Baun.</p> <p>Para tenaga kerja yang direkrut kemudian dikirim bekerja di perusahaan sarang burung walet. Namun selama bekerja, mereka dilarang keluar dari tempat penampungan yang selalu terkunci dan dijaga ketat <i>security</i> perusahaan.</p> <p>Mereka juga tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan tidak memberikan kesempatan untuk beribadah. Apabila sakit, mereka tidak cepat memperoleh perawatan kesehatan dari tenaga medis.</p>
--	--------------------------------	-------------------------------	---